

Volume 1 | No.1 | Edisi : Juli – Desember 2012 | ISSN : 2302-4585

# JURNAL

# *Kompetitif*



*FAKULTAS EKONOMI*  
**UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Kompetitif

Vol. 1

No. 1

Hal : 1 - 113

Palembang, September 2012

ISSN: 2302 - 4585

# KOMPETITIF

---

## Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

---

### Dewan Redaksi

- Pelindung : Prof. Dr. Ir. Edizal AE ( Rektor )
- Pembina : Syaiful Sahri,SE.MSi (Dekan Fakultas Ekonomi)  
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M
- Pimpinan Umum : Hj.Nina Fitriana, SE.,M.Si
- Ketua Penyunting : Msy.Mikial,SE.,Ak.,M.Si
- Penyunting Ahli : Prof. Dr. H. Masngudi, APU ( Universitas Borobudur)  
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M (UTP)  
Prof. Dr. H.Taufiq Marwah, SE.,M.Si (Universitas Sriwijaya)  
Dr. Kamaluddin,SE.,M.M (Universitas Bengkulu)  
Dr. Helmi Yazid,SE.,M.Si (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa)
- Penyunting Pelaksana : Sugiri Dinah, SE.,M.Si, Amrillah Azrin,SE.MM,  
Lusia Nargis, SE.,M.Si, Rizal Effendi,SE.MSi
- Sekretariat : Muhammad Said, SE.MSi (Pembantu Umum)  
: Ernawati.SE.Ak (Keuangan)  
: Yun Suprani,SE.MSi (Administrasi)
- Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
- Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang  
Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129  
Telp. 0711-354654 E-mail : redaksi.fe\_utp@yahoo.co.id

Jurnal "**Kompetitif**" adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Januari, Juli) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan kepada masyarakat ilmiah.

# KOMPETITIF

Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang

## DAFTAR ISI

**Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam**  
Kamsrin Sa'i 1 - 11

**Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin**  
Msy. Mikial 12 – 20

**Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin**  
Rizal Effendi 21 – 32

**Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan**  
Amrillah Azrin 33 - 42

**Analisa Hubungan Kekayaan Bersih Wajib Pajak Badan Dengan Beban Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur**  
Sonang PP 43 - 57

**Persepsi Konsumen Terhadap Persaingan Antar Merek Melalui Iklan (Studi Kasus Persaingan Antar Produk Deterjen Rinso Dan So Klin)**  
Lusia Nargis 58 - 69

**Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Tanggungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang**  
Meti Zuliyana 70 – 78

**Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Prodexim Palembang**  
Kusminaini Armin 79 – 90

**Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang**  
Nina Fitriana , Agustina M 91 – 100

**Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Prinsip *Value For Money* Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**  
Rosalina Pebrica Mayasari 101 – 113

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN  
EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

*Msy. Mikial \*)*

---

**ABSTRACT**

*Formulation of the problem in this study is whether the Revenue Budget at the Department of Revenue District Banyuasin been effective and efficient. The aim is to assess the effectiveness and efficiency of budget revenues in Banyuasin District Revenue Office. Research conducted includes descriptive studies, where the goal is to present a structured, factual and accurate facts about the financial ratio analysis of Department of Revenue.*

*Variables to be analyzed in this study is to explain financial ratios, Revenue Budget, effectiveness, and efficiency, where the variables will be measured by the ratio scale. Analysis conducted in this study was to assess the effectiveness and efficiency in the realization of revenue by using an analytical tool that is the ratio of self-sufficiency ratio, the ratio of effectiveness, consistency ratio, Debt Service Coverage Ratio, and growth ratios.*

*Based on the results of research and analysis has been carried out concluded that the District Revenue Office Banyuasin been able to realize the revenue budget of the region, because its terms are met and the assessment of the effectiveness and efficiency is good enough Analysis conducted in this study was to assess the effectiveness and efficiency in the realization of revenue by using an analytical tool that is the ratio of self-sufficiency ratio, the ratio of effectiveness, consistency ratio, Debt Service Coverage Ratio, and growth ratios.*

*Based on the results of research and analysis has been carried out concluded that the District Revenue Office Banyuasin been able to realize the revenue budget of the region, because its terms are met and the assessment of the effectiveness and efficiency is good enough*

*Key words: financial ratio, budget, Effectiveness and Efficiency*

**A. PENDAHULUAN**

Sejalan dengan pesatnya pelaksanaan pembangunan serta semakin kompleksnya tugas pemerintah daerah yang sudah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga timbul pemikiran untuk menggali dan mengelola pendapatan asli daerah, baik berupa pajak ataupun retribusi

yang mempunyai peranan penting untuk membiayai tugas operasional pemerintah yang dipungut dari masyarakat sebagai manifestasi konkrit kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, disamping dari sumber-sumber lainnya. Pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah semakin diperhatikan, apalagi dengan

---

\*) Dosen Fakultas Ekonomi UTP

diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah.

Penyerahan wewenang yang luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahannya mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal, agama dan kewenangan lainnya, dan konsekuensinya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu biasanya dipenuhi apabila Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan. Untuk mengelola sumber daya keuangan, pemerintah daerah harus lebih tanggap dan mengerti karena dalam perekonomian modern laporan keuangan daerah sudah merupakan media penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sebelum menyusun anggaran yang digunakan untuk penyukuran kinerja keuangan maupun sebagai alat untuk mengambil keputusan, maka penyusunan anggaran harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran, yaitu : Transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran dan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter estándar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu setahun. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output dan keluaran, kebijakan

dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dikatakan efektif bila rasio yang dicapai minimal 100%. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Efisiensi dikatakan efisien bila rasio yang dicapai kurang dari 100%.

Dinas Pendapatan Daerah dapat menggunakan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi serta dapat juga untuk mengetahui kondisi keuangan dalam pengambilan keputusan, tetapi dalam kenyataannya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin belum melaksanakan rasio keuangan dalam rangka pengukuran kinerja keuangan yang berguna untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Tujuan rasio keuangan adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan prestasi untuk mencapai kemajuan serta untuk mendeteksi kesehatan dalam suatu perusahaan maupun pemerintahan .

Menurut Abdul Halim (2007:150) penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan tentang nama dan kaedah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio perlu dilaksanakan. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber pada anggaran antara lain.

### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan masyarakat.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat \& Pinjaman}}$$

Menurut Kadjatmiko (2001:10) suatu daerah dikatakan mandiri bila rasio kemandiriannya mencapai minimal >50%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

## 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai < 1 atau , 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

## 3. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap anggaran} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Anggaran}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap anggaran} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Anggaran}}$$

## 4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Pokok angsuran} + \text{Bunga} + \text{bi.pinjaman}}$$

## 5. Rasio Pertumbuhan

Mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Rasio**

## **Keuangan Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin.**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sudah efektif dan efisien ?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin, sedangkan kontribusinya adalah :

1. Sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin dalam menghitung rasio keuangan untuk menilai efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan daerahnya.
2. Sebagai masukan bagi seluruh Dinas Pendapatan Daerah agar dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan kemungkinan memperhitungkan rasio keuangan dalam menilai kesehatan keuangan suatu instansinya.
3. Sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan hasil penelitian ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Rancangan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif, dimana tujuannya yaitu menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang analisis rasio keuangan Dinas Pendapatan Daerah.

### **2. Operasionalisasi Variabel**

Variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan rasio keuangan, Anggaran Pendapatan Daerah, efektivitas, dan efisiensi, dimana variabel-variabel tersebut akan diukur dengan skala rasio.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data**

- a. Wawancara, dengan mengadakan komunikasi langsung secara lisan dengan pihak yang diteliti.
- b. Observasi, melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data.
- c. Kuisisioner, dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang dianggap perlu.
- d. Dokumenter, dengan cara memperoleh data dengan jalan mengutip data atau catatan yang disediakan perusahaan.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris maupun keuangan dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Analisis kualitatif dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh dari objek penelitian serta membandingkannya dengan teori-teori dan ketentuan yang berlaku

#### C. HASIL PENELITIAN DAN

##### PEMBAHASAN

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangga daerah yang berprinsip ke arah terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sejalan dengan pesatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuasin tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, perkembangan di sector pajak dan retribusi akan menimbulkan pemikiran pemerintah untuk menggali, mengelola dan meningkatkan PAD.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam

merealisasikan pendapatan daerah dengan menggunakan alat analisis rasio sebagai berikut :

##### 1. Analisis Rasio Kemandirian

Tahun 2008 rasio kemandirian sebesar 59,26%

Tahun 2009 rasio kemandirian sebesar 84,59% dan

Tahun 2010 rasio kemandirian sebesar 89,46%

Dari rasio kemandirian terlihat bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial sudah bagus karena sudah di atas 50%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal rendah.

##### 2. Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Tahun 2008 rasio efektivitas sebesar 1,01 dan rasio efisiensi sebesar 0,05

Tahun 2009 rasio efektivitas sebesar 0,85 dan rasio efisiensi sebesar 0,05

Tahun 2010 rasio efektivitas sebesar 1,13 dan rasio efisiensi sebesar 0,03

Dari rasio efektivitas terlihat sudah cukup efektif, karena sudah di atas 100%, hanya pada tahun 2009 realisasi PAD tidak memenuhi target karena target terlalu tinggi dan objek pajak tidak bertambah serta banyak

perusahaan yang terlambat membayar pajak. Untuk rasio Efisiensi sudah baik karena di bawah 100%.

### 3. Analisis Rasio Keserasian

Tahun 2008 rasio belanja rutin sebesar 5,80% dan rasio belanja pembangunan sebesar 0,41%

Tahun 2009 rasio belanja rutin sebesar 7,75% dan rasio belanja pembangunan sebesar 0,78%

Tahun 2010 rasio belanja rutin sebesar 5,26% dan rasio belanja pembangunan sebesar 0,68%

Dari rasio di atas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kab.Banyuasin masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sedangkan belanja pembangunan yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat masih relatif kecil.

### 4. Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuasin tidak melakukan pinjaman, sehingga DSCR tidak dapat dihitung, itu berarti Kab. Banyuasin sudah mampu membiayai rumah tangganya sendiri tanpa melakukan pinjaman

### 5. Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun

2008 sampai 2009 PAD mengalami pertumbuhan sebesar 72,30% dan pada tahun 2010 pertumbuhan PAD sebesar 56,20%. Dilihat dari total pendapatan dari tahun 2008-2009 naik 17,17% dan kembali meningkat pesat pada tahun 2010 menjadi sebesar 66,45%, ini menunjukkan kinerja keuangan Dispenda Kab.Banyuasin sudah baik dalam merealisasikan pendapatan.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai analisis rasio keuangan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sudah efektif dan efisien karena kemandirian pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat sudah baik, sudah mencapai di atas 50%. Untuk Rasio efektivitas dan efisiensi Dispenda Kab.Banyuasin menggambarkan kinerja yang baik karena sudah mencapai target

minimal 100% untuk rasio efektivitas, hanya pada tahun 2009 yang belum mencapai target karena objek pajak tidak bertambah serta banyak perusahaan yang terlambat membayar pajak, sedangkan rasio efisiensi sudah baik karena sudah mencapai target dibawah 100%.

- Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin sebagian besar diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin dan sisanya baru diperuntukkan belanja pembangunan. Dispenda Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan kegiatannya belum pernah melakukan pinjaman kecuali mendapatkan bantuan dari provinsi. Sedangkan pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan positif dan ada kecenderungan semakin meningkat.

## **2. Saran**

- Pungutan PAD dapat menjadi sumber penerimaan yang ideal dan bersifat kontinyu, maka Dispenda sebaiknya selalu berusaha untuk menggali sumber-sumber potensial PAD
- Perlu adanya peningkatan kualitas bagi aparat keuangan, dalam hal ini khususnya para pemungut baik

melalui pendidikan dan pelatihan administrasi maupun yang bersifat teknis operasional.

- Mengoptimalkan kerja tim intensifikasi khusus dalam rangka peningkatan pendapatan daerah secara efektif dan berkesinambungan, guna memantau secara langsung kegiatan operasional pengelolaan pendapatan daerah di lapangan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hali, 2007. **Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Indra Bastian, 2001, **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Kadjatmiko, 2001. **Perhitungan dan Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2002**, Rapat Kerja Teknis Keuangan.
- Mardiasmo, 2002 **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Murchdarsyah Sinungan, 2000, **Produktivitas dan Efektivitas**, Penerbit PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan Syafri Harahap, 2008, **Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2006. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan kesembilan CV.Alfabeta, Bandung
- Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004, **Tentang Pemerintah Daerah dan Peimbangan Keuangan Daerah**.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, **Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah**.